

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KOTA KOTAMOBAGU

Eko Gunawan Asnawi¹, Daisy S.M. Engka², Een. N Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ekoasnawi061@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh indikator makro ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya ketimpangan pendapatan. Atau dengan kata lain salah satu kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicapai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi Inklusif terhadap dengan kemiskinan, pengangguran dan Gini ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data – data tersebut adalah Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan Gini Rasio, PDRB ADHK di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu tahun 2015 – tahun 2021 yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, dengan alamat resmi <https://sulut.bps.go.id>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 bersifat belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, pengangguran dan gini ratio, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non inklusif terhadap kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Kata Kunci : *Pertumbuhan ekonomi inklusif, Kemiskinan, Pengangguran, Gini ratio*

ABSTRACT

Economic growth as one of the indicators of the success of regional development must be supported by macroeconomic indicators that show the level of public welfare. This means that high economic growth must be in line with the ability of regions to reduce unemployment and poverty, including income inequality. Or in other words, one of the economic development performance of a region is shown by the inclusive economic growth achieved.

This study aims to determine whether there is inclusive economic growth towards poverty, unemployment and Gini ratio in Bolaang Mongondow Regency and Kotamobagu City.

The data used for this study are secondary data. Secondary data is a type of data obtained and excavated through the results of second-party processing from the results of field research. These data are Data on Economic Growth, Poverty, Open Unemployment Rate and Gini Ratio, ADHK GRDP in Bolaang Mongondow Regency and Kotamobagu City in 2015 – 2021 obtained from the official website of the Central Statistics Agency (BPS) North Sulawesi, with an official address <https://sulut.bps.go.id>

The results showed that economic growth in Bolaang Mongondow Regency and Kotamobagu City in 2015-2021 was not inclusive in reducing poverty, unemployment and gini ratio, this is indicated by the non-inclusive growth of poverty, unemployment and inequality.

Keywords : *Inclusive economic growth, Poverty, Unemployment, Gini ratio*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh indikator makro ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya ketimpangan pendapatan. Atau dengan kata lain salah satu kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukan oleh pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicapai.

Menurut Kuncoro (2000) pemerintah akan melakukan sebuah kebijakan pembangunan daerah dengan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah guna mempersempit kesenjangan regional. Pada awalnya, perubahan konsep dan kewenangan daerah dilakukan berdasarkan pemusatan kebijakan pusat, namun selanjutnya akan diarahkan agar setiap daerah dapat mandiri dalam mengelola kawasannya dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan daerahnya sendiri. Hal tersebut akan menciptakan pola pembangunan yang berbeda yang disebabkan oleh adanya letak geografis, karakteristik, sumber daya alam, sarana dan prasarana pembangunan, serta sumber daya manusia yang ada. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan harus sesuai dengan karakteristik potensi daerah tersebut, maka dari itu dalam pembangunan daerah membutuhkan pengenalan potensi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan latar belakang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran serta mengurangi ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dalam hal ini konsep pertumbuhan inklusif berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang *pro poor*. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang “tidak diuntungkan” dalam perekonomian. Mengacu pada dua fokus tersebut, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antar kelompok) (Amalina, S. dkk, 2013).

Menurut Prasetyantoko, dkk (2012), pembangunan ekonomi inklusif adalah Pembangunan untuk semua orang, tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya. Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial, yang tergantung pada dua faktor yaitu: (i) peluang rata-rata yang tersedia bagi masyarakat, dan (ii) bagaimana peluang dibagi kepada masyarakat.

Beberapa alasan mengapa pertumbuhan harus inklusif yaitu:

1. Pertimbangan kesetaraan dan keadilan, pertumbuhan seharusnya terdistribusi dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat dan daerah.
2. Pertumbuhan dengan ketimpangan yang persisten dapat membahayakan kondisi sosial, seperti orang miskin dan pengangguran lebih rentan masuk dalam aktivitas kriminal, perempuan lebih rentan ke prostitusi, dan tenaga kerja anak yang tidak diharapkan.
3. Ketimpangan dalam hasil dan akses yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas politik dan struktur sosial sehingga mengurangi potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu ?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi bersifat Inklusif terhadap pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dengan ketimpangan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan ekonomi Inklusif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bokang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan inklusif terhadap pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pertumbuhan inklusif terhadap ketimpangan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, diharapkan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran dan masukkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

2. Bagi Masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.
3. Bagi peneliti, Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai variabel apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow dan kota Kotamobagu.

Tinjauan Pustaka

Teori Perencanaan Pembangunan

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan kepada perubahan besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi, (Todaro, 2003)

Teori Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Menurut Ali dan Zhuang (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya yang miskin.

Pertumbuhan ekonomi inklusif dapat dikatakan sebagai pendekatan baru dalam teori- teori pertumbuhan (Huang & Quibria, 2013). Hal tersebut sesuai dengan definisi UNDP bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga manfaat pertumbuhan tersebut dinikmati oleh semua pihak. Pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang mampu mengurangi ketimpangan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif bukan hanya mengejar tingginya angka pertumbuhan melainkan juga kesetaraan yang diukur dari penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi inklusif erat kaitannya dengan pertumbuhan *pro-poor* dimana keduanya bermaksud menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan inklusif memiliki dimensi yang berbeda dalam hal kesetaraan pendapatan (Ranieri & Ramos, 2013). *Pro-poor* lebih berfokus pada orang yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan pertumbuhan inklusif berfokus pada penyetaraan di semua lapisan masyarakat, baik miskin, menengah, dan kaya. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan yang hanya berpihak pada kaum miskin akan berisiko

menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengutamakan kesetaraan antar tingkat masyarakat guna memperluas peluang ekonomi baru (McKinley, 2010).

Teori Kemiskinan

Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Selanjutnya Supriatna (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Teori Pengangguran

Menurut Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin besar pula barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja.

Teori Gini Ratio

Rasio Gini atau koefisien gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Wulan Retno Hapsari berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi inklusif telah terjadi di kabupaten dan kota di wilayah propinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan cakupan 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah Penentuan Bobot Variabel, Normalisasi Data Awal, Penghitungan Indeks Pertumbuhan. Hasil IGI Kabupaten/Kota di propinsi Jawa Tengah terdapat enam Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori sangat memuaskan, dua puluh lima Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori memuaskan dan terdapat empat Kabupaten dalam kategori kurang memuaskan.

Penelitian Oleh Dyah Hapsari Amalina dengan judul Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif Di Kawasan Indonesia Bagian Barat Dan Indonesia Bagian Timur, Tujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan Ekonomi di Indonesia telah Inklusif? data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data provinsi-provinsi di Indonesia selama 10 tahun yaitu tahun 2002 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang seluruhnya dikumpulkan oleh BPS. Metode kuantitatif merupakan metode yang dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian 1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2008-2012 belum inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Provinsi DIY dan Papua Barat adalah provinsi yang pertumbuhannya inklusif untuk semua indikator pada tahun 2008. Provinsi NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan adalah provinsi yang pertumbuhannya inklusif untuk semua indikator pada tahun 2010. Provinsi Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah adalah provinsi yang pertumbuhannya inklusif untuk semua indikator pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2009 dan 2012 tidak satupun provinsi yang memiliki pertumbuhan

yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 2. Pertumbuhan yang inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bukan fenomena yang konsisten di Indonesia. 3. Fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB). Meskipun demikian, persentase jumlah provinsi di IBB memiliki kecenderungan semakin menurun terutama sejak tahun 2010.

Penelitian oleh Cahyaning Wahyu Singosari, 2017 dengan judul Analisis Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Pertumbuhan Inklusif di Jawa Timur. Tujuan penelitian Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi dalam tabel input-output Jawa Timur yang akan mewujudkan pertumbuhan inklusif di Jawa Timur. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder Tabel Input-Output Provinsi Jawa Timur tahun 2006, 2010, dan 2015 yang diperoleh dari BPS Jawa Timur. Metode analisis menggunakan Pengganda Pemerintah (Government Multiplier Effect), Analisis Pengganda Tenaga Kerja (Employment Multiplier Effect), Linkage. Berdasarkan hasil penelitian, sektor inklusif Jawa Timur dari tahun 2006 hingga tahun 2015 merupakan sektor yang dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan inklusif di Jawa Timur. Sektor inklusif tahun 2006 hingga tahun 2015 berjumlah satu sektor dengan empat komoditas, sektor inklusif tahun 2006 berjumlah satu sektor dengan empat komoditas antara lain Barang Dari Plastik, Jasa Reparasi, Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, dan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial. Komoditas sejtor inklusif tahun 2010 antara lain Pakan Ternak, Logam Dasar, Barang Dari Logam Lainnya, dan Mesin Dan Perlengkapan Ytdl. Sedangkan komoditas sektor inklusif tahun 2015 antara lain Industri Kimia Dasar, Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional, Industri Karet Dan Barang Dari Karet, dan Industri Barang Dari Plastik.

Penelitian Oleh Hettyca Astuningdyas¹, Haerudin², Budi Sugito³ Dengan Judul Penguatan Pertumbuhan Inklusif Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang difokuskan pada data tahun 2019,2020 dan prediksi tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkanbahwaketiga strategi tersebut sudah

tepat dalam menjawab akar permasalahan di Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan semakin tangguh dan mampu mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan ketahanan nasional bangsa.

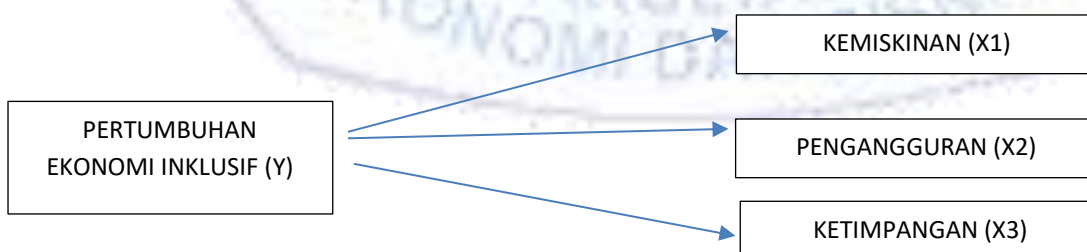
Penelitian Oleh M. Mujahid Shaleh¹, 2021 dengan judul Indeks Pembangunan/Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat indeks pembangunan/pertumbuhan ekonomi Inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2013-2020 dikaitkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponennya di Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu yang sama. Penelitian ini menggunakan data sekunder, Teknik analisis menggunakan analisis kuantitatif dengan mengacu pada indikator pembangunan/pertumbuhan inklusif, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan harga konstan tahun 2010 termasuk tambang mengalami kontraksi pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,95 persen. Indeks Pembangunan inklusif provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2013-2020 berada pada kategori “memuaskan” dengan rata-rata sebesar 5,36. Indeks Pertumbuhan Inklusif (Subpilar 1) berada dalam kategori memuaskan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama tahun 2013-2020 rata-rata sebesar 66,17 berada dalam kategori “Sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Usia harapan hidup penduduk tahun 2013 -2020 rata-rata sebesar 65,58 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) rata-rata sebesar 13,20 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk adalah 6,90 tahun dan Pengeluaran perkapita penduduk rata-rata sebesar Rp 9.738.000,-.

Penelitian oleh Yuniar Sri Hartati dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Terdapat dua metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis model Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR) dan analisis regresi linier berganda dengan data time series. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki

pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Penelitian oleh Silvi Dewi Purwanti¹⁾, Farida Rahmawati^{2*)} dengan judul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana data yang diperoleh bersumber dari Publikasi Online dari World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Keuangan. Metode yang digunakan adalah Analisis deskriptif yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Analisis data menggunakan excel, Pengukuran pertumbuhan ekonomi inklusif dengan konsep PEGR meliputi tiga dimensi pengukuran. Dan Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan jenis penelitian yang menggunakan deret waktu dan dengan lokasi penelitian di satu tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia belum konsisten tercapai setiap tahun. Hasil analisis regresi data time series menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kerangka Pikir



Gambar 1

Sumber Kajian diolah Penulis

2. METODE PENELITIAN

Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya. Data – data tersebut adalah Data Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tingkat pengangguran Terbuka dan Gini Rasio, PDRB ADHK di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara, dengan alamat resmi <https://sulut.bps.go.id>

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Sumber data penelitian adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu diperoleh dan dicatat dari pihak lain.

Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

1. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang ditandai dengan PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, diukur dalam persen.
2. Kemiskinan (X_1) adalah tingkat kemiskinan (P_0) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu diukur dalam persen.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (X_2) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, dengan satuan persen.
4. Indeks Gini atau Rasio Gini (X_3) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu, diukur dalam satuan index.

Metode Analisis

Untuk mengukur pertumbuhan inklusif menggunakan Inklusif Growth Index (IGI).

1. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan adalah

$$IGp = (Gpg/Gp) \hat{G}g$$

Dimana :

IGp : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

G_p : elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

G_{pg} : elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

\hat{G}_g : pertumbuhan ekonomi

IG_p menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IG_p > \hat{G}_g$.

2. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran adalah

$$IG_p = (G_{pg}/G_p) \hat{G}_g$$

Dimana :

IG_p : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran

G_p : elastisitas pengangguran terhadap pendapatan rata-rata

G_{pg} : elastisitas pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi

\hat{G}_g : pertumbuhan ekonomi

IG_p menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan pengangguran, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IG_p > \hat{G}_g$.

3. Pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan adalah

$$IG_p = (G_{pg}/G_p)G_g$$

Dimana :

IG_p : koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan

G_p : elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata

G_{pg} : elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi

\hat{G}_g : pertumbuhan ekonomi

IG_p menyatakan inklusifitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan, sehingga pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IG_p > \hat{G}_g$.

4. Jika $IG_p < \hat{G}_g$ berarti pertumbuhan ekonomi tidak bersifat inklusif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	10,89	6,56	inklusif
2	2017	1,76	6,67	Non inklusif
3	2018	11,77	7,49	inklusif
4	2019	5,47	7,89	Non inklusif
5	2020	-711,11	0,98	Non inklusif
6	2021	77,58	3,87	inklusif
Rata - rata		-100,61	5,58	Non inklusif

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, pada Tahun 2016, 2018 dan 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow sudah Inklusif, dimana pada tahun – tahun tersebut terdapat beberapa program pemerintah pusat yang menopang program percepatan penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sampai 40%. Saat ini bantuan dari pemerintah pusat untuk bantuan iuran sesuai SK Menteri Sosial Nomor 170 Tahun 2015 yaitu Program PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Program berbasis keluarga yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera untuk PBI dan keluarga sangat miskin untuk PKH. tapi pada tahun 2017, 2019 dan 2020 masih belum inklusif. Jadi kemiskinan tetap menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Kemiskinan Kota Kotamobagu

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	1,77	6,63	Non inklusif
2	2017	2,52	6,79	Non inklusif
3	2018	-2,08	6,66	Non inklusif
4	2019	-9,17	6,13	Non inklusif
5	2020	-2941,93	0,20	Non inklusif
6	2021	99,22	4,20	Inklusif
Rata – rata		-474,95	5,10	Non inklusif

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada beberapa periode penelitian, nilai koefisien pertumbuhan inklusif di kotamobagu tidak pernah konsisten mencapai pertumbuhan yang inklusif,

pada tahun 2016-2020 kondisi pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan masih belum inklusif, berbeda dengan tahun 2021 kondisi pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu sejalan dengan teori.

Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu belum bersifat inklusif atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan. Masih pentingnya perencanaan pembangunan daerah Kota Kotamobagu kearah pertumbuhan ekonomi inklusif atau dengan kata lain pertumbuhan Ekonomi ke arah *Pro-Poor*. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Kota Kotamobagu khususnya dalam mengurangi kemiskinan.

Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pengangguran di Bolaang Mongondow

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	10,77	6,56	Inklusif
2	2017	1,73	6,67	Non inklusif
3	2018	13,13	7,49	Inklusif
4	2019	6,92	7,89	Non inklusif
5	2020	-3428,12	0,98	Non inklusif
6	2021	71,69	3,87	inklusif
Rata - rata		-553,98	5,58	Non inklusif

Sebagaimana yang terjadi, sepanjang periode pengamatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu menjalankan perannya untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tapi pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2021 sudah mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow belum bersifat inklusif atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mendorong penurunan pengangguran secara signifikan. Masih pentingnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kearah pertumbuhan ekonomi inklusif atau dengan kata lain pertumbuhan Ekonomi ke arah *Pro-Unemployment*. Dalam konteks perencanaan terintegrasi masuk dalam Perencanaan Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia, menopang sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Pengangguran di Kota Kotamobagu

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	1,77	6,63	Non inklusif
2	2017	2,52	6,79	Non inklusif
3	2018	-2,08	6,66	Non inklusif
4	2019	-9,17	6,13	Non inklusif
5	2020	-2941,93	0,20	Non inklusif
6	2021	99,22	4,20	Inklusif
Rata - rata		-474,95	5,10	Non inklusif

Sepanjang periode pengamatan, Kota Kotamobagu yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan pengangguran hanya terjadi di tahun 2021. Dengan kondisi demikian pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu dapat dikatakan belum inklusif dalam menurunkan pengangguran. Peran pemerintah daerah di masa yang akan datang masih tetap *pro-unemployment* sebagai prioritas pembangunan daerah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Terutama Kota Kotamobagu yang menjadi barometer pembangunan manusia di Kawasan Bolaang Mongondow Raya (BMR). Pertumbuhan inklusif masih menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kotamobagu.

Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Gini Ratio di Bolaang Mongondow

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	10,89	6,56	Inklusif
2	2017	1,76	6,67	Non inklusif
3	2018	11,77	7,49	Inklusif
4	2019	5,47	7,89	Non inklusif
5	2020	-711,11	0,98	Non inklusif
6	2021	77,58	3,87	inklusif
Rata - rata		-100,61	5,58	Non inklusif

Selang enam tahun terakhir di Kabupaten Bolaang Mongondow masih terdapat pertumbuhan yang tidak bersifat inklusif terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Tapi pada tahun 2016,

tahun 2018 dan tahun 2021 nilai indeks pertumbuhan inklusif sudah menuju kearah *pro-inequality*.

Namun secara rata-rata dalam 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow belum bersifat inklusif atau peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mendorong penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat secara signifikan. Masih pentingnya perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow kearah pertumbuhan ekonomi inklusif atau dengan kata lain konteks perencanaan terintegrasi masuk dalam Perencanaan Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia, menopang sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

**Hasil Perhitungan Indeks Pertumbuhan Inklusif dan Tingkat ketimpangan
di Kota Kotamobagu**

No	TAHUN	IGp	Gg	Ket
1	2016	1,77	6,63	Non inklusif
2	2017	0,00	6,79	Non inklusif
3	2018	-2,08	6,66	Non inklusif
4	2019	-9,17	6,13	Non inklusif
5	2020	-2941,93	0,2	Non inklusif
6	2021	99,22	4,2	Inklusif
Rata - rata		-475,37	5,10	Non inklusif

Sepanjang periode pengamatan, Kota Kotamobagu yang pertumbuhannya inklusif dalam menurunkan angka ketimpangan pendapatan/rasio gini hanya terjadi di tahun 2021. Dengan kondisi demikian pertumbuhan ekonomi di Kota Kotamobagu dapat dikatakan belum inklusif dalam menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Peran pemerintah daerah di masa yang akan datang masih tetap harus *pro-inequalityt* sebagai prioritas pembangunan daerah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Terutama Kota Kotamobagu yang menjadi barometer pembangunan manusia di Kawasan BMR. Pertumbuhan inklusif masih menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 belum bersifat inklusif dalam menurunkan kemiskinan, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non Inklusif terhadap kemiskinan.
2. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 belum bersifat inklusif dalam menurunkan pengangguran, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non Inklusif terhadap pengangguran.
3. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu pada tahun 2015-2021 belum bersifat inklusif dalam menurunkan ketimpangan, ini di tandai masih adanya pertumbuhan yang bersifat non Inklusif terhadap ketimpangan.
4. Pertumbuhan Ekonomi inklusif masih menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu menopang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing

Saran

Dengan adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu cenderung berjalan dengan tidak Inklusif, maka hendaklah pemerintah daerah agar lebih fokus terhadap pemerataan hasil - hasil pembangunan dan distribusi manfaat dari pertumbuhan tersebut, tidak dengan sekedar mengejar pencapaian pertumbuhan setinggi-tingginya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat program-program pembangunan yang langsung ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah pertumbuhan yaitu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. And J. Zhuang. 2007. Inklusif Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications. ERD Working Paper Series, No. 97.
- Ali, Ifzal dan Hyun Hwa Son. 2007. Measuring Inclusive Growth. Asian Development Review Vol. 24, No. 1, pp. 11–31. Manila: ADB.

- Azis, Iwan. J. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Adisasmita Rahardjo, 2013, Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad Lincoln, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Amalina S, Hutagaol MP, Asmara A, 2013, Pertumbuhan Inklusif : Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol. 2 Nomor 2. Hlm 85-112.
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. 2012. Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia. Jakarta: LP3ES : Prakarsa.
- McKinley, Terry. 2010. Inklusif Growth Criteria and Indicators: an Inklusif Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, No. 14. Manila: Asian Development Bank
- Todaro, Michael P. 2011, Pembangunan Ekonomi. Jakarta. Erlangga.